

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
(STASIUN PSDKP TARAKAN)
TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS (indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

1. Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
2. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;
3. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).
4. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:
 - a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
 - b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Formula:

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah	() Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada			
8. SUMBER DATA	:	Laporan Supevisi Pembinaan Pokmaswas			
9. STATUS DATA	:	() Raw Data	(√) Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(√) Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	(√) Buat Baru	
12. POLARISASI	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan	() Triwulanan	(√) Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

7. Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
8. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
9. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
 - b. Cakupan wilayah pengawasan;
 - c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 - d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
-----------------------------	---	--------

5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada			
8. SUMBER DATA	:	Laporan Operasi Kapal Pengawas			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;
- Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
- Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
 - 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
 - 2) Cakupan wilayah pengawasan;
 - 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
 - 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM² (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

4. SATUAN PENGUKURAN

: indeks

5. JENIS ASPEK TARGET: (√) Kuantitas/
Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT Pengawasan SDKP			
8. SUMBER DATA	:	Laporan operasi speedboat pengawasan			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian pembangunan kapal pengawas/speedboat Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Sarana Pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Target pengadaan sarana pengawasan SDKP tahun 2023 yaitu Speedboat Pengawas sebanyak 2 unit, pembangunannya dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Progres pembangunan merupakan persentase penyelesaian pembangunan konstruksi.2. Pelaksanaan pengadaan Speedboat Pengawas pada tahun 2023 memiliki target penyelesaian 100%.
		<p>Formula:</p> $P_{Sb} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>P Sb = Persentase penyelesaian pembangunan sarana pengawasan SDKP(%) a = Progres pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP (%) b = Target progress pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP</p>
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√)Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tarakan

8. SUMBER DATA	:	Dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas/supervisi dan dokumen pembayaran		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Prasarana Pengawasan SDKP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prasarana Pengawasan Utama (lahan, pos pengawasan/kantor, bangunan operator, rumah penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serba guna, dermaga)2. Prasarana Pengawasan pendukung (gedung ibadah, garasi speedboat, rumah genset, penampungan air bersih, jalan lingkungan, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, tempat parkir, pagar lingkungan, taman, drainase) <p>Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Progres pembangunan merupakan persentase penyelesaian pembangunan konstruksi.2. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP pada tahun 2023 memiliki target penyelesaian 100%.
		<p>Formula:</p> $P_{Pras} = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>P Pras = Persentase penyelesaian pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)</p> <p>a = Progres pelaksanaan pengadaan pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi (%)</p> <p>b = Target progress pelaksanaan pengadaan pembangunan/renovasi/rehabilitasi/restorasi (%)</p>
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP (Batam, Bena, Bitung, Belawan, Cilacap, Tarakan, Kupang, Pontianak)			
8. SUMBER DATA	:	Dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas/supervisi dan dokumen pembayaran			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan2. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 89 (delapan puluh sembilan) unit (<i>Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat</i>).3. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%), perawatan prediktif (<i>predictive maintenance</i> 40%), dan perawatan darurat (<i>breakdown maintenance</i> 10%).
		Formula: $X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$
		Keterangan: X_p = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana x_a = Preventive x_b = Predictive x_c = Darurat
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat POA dan UPT Pengawasan SDKP

8. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan;
- Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain : ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).

Formula:

$$x_k = \frac{(x_{kid} + x_{prl2} + x_{df} + x_{jasta} + x_{jikan} + x_{wp3k} + x_{pkprl} + x_{cemar})}{n}$$

x_k : Persentase pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

x_{kid} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi

x_{cemar} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran)

x_{df} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* (pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF)

x_{jasta} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan

- x_{jikan} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
- x_{wp3k} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil
- x_{pkprl} : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL)
- n : Jumlah komponen kepatuhan SDK

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,10	SPT, Surat pemberitahuan, daftar pertanyaan
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Formula perhitungan kepatuhan usaha

$$X_{...} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- $X_{...}$ = Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan.....(%)
- X = Hasil pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan.....(nilai)
- n = Jumlah pelaku (pelaku)

Penjelasan Detil

1. Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/pengamb
negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

2. Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam-

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin ekstraksi garam)
- Kesesuaian kegiatan usaha dengan dokumen perizinan

3. Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan berusaha (NIB/Izin Pelaksanaan Reklamasi/KKPRL/dokumen lainnya)
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

4. Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian
- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km²/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

5. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB)

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

6. Wisata tirta lainnya

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking mangrove*, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin wisata tirta lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

7. Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan tersebut, antara lain:

- penangkapan ikan
 - penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
 - pembudidayaan ikan
 - penelitian
 - pendidikan
 - kegiatan pariwisata alam perairan
 - pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar
-

-
- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
 - pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
 - penempatan instalasi di laut
 - pemanfaatan air laut selain energi
 - pembuatan foto, film dan video komersial
 - landing, take off, dan taxiing seaplane

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya)
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan.

8. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Usaha yang meliputi :

1. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
2. Penampungan dan penyaluran air baku;atau
3. Aktifitas penunjang treatment air.

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB, Izin pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ Izin pemanfaatan air laut selain energi nonproduk)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

9. Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya.
Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

Parameter :

- memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

10. Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan).

Parameter :

- Tidak menggunakan dan/atau memiliki bom ikan/racun ikan dan setrum ikan

11. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL)

Parameter :

- Memiliki dokumen KKPRL
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP			
8. SUMBER DATA	:	Laporan pengaduan masyarakat, Data Pelaku Usaha (OSS), NSPK terkait pengawasan sumber daya kelautan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP)			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha adalah perbandingan nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa.
- Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental

Formula:

$$X_p = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

x_p : Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)

x_n : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

n : Jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa

PENJELASAN DETAIL

1. Pengawasan Rutin Berbasis OSS

- Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat.
- Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
- Pelaksanaan pengawasan rutin berbasis OSS mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan meliputi:
 - a. Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha
 - c. Pemenuhan sarana
 - d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - e. Pemenuhan pelayanan
 - f. Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - g. Pemenuhan sistem manajemen usaha

Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT/STKL, Surat Pemberitahuan ke Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pemeriksaan	0,70	Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021)
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

2. Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

- Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur.
- Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO
- Pengawasan kedatangan kapal meliputi:
 - Kapal sebelum sandar
Pemeriksaan ada/tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dari (Analisis SPKP untuk melihat dugaan pelanggaran DPI) sumber data dari tim SPKP Ditjen PSDKP dengan output notifikasi adanya pelanggaran DPI/SPKP atau tidak;
 - Kapal sebelum bongkar (onboard diatas kapal-norma waktu maksimal 30 menit)
Pemeriksaan administrasi kapal perikanan (pemeriksaan poin 1-16 pada HPK Kedatangan) dengan output rekomendasi bongkar
 - Kapal setelah bongkar
Pemeriksaan/uji petik kesesuaian hasil tangkapan ikan (jumlah, jenis, kondisi hasil tangkapan)

Tahap verifikasi kedatangan kapal perikanan dibuktikan dengan HPK Kedatangan
Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan penangkapan ikan terukur sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT
2	Pemeriksaan	0,70	Pemeriksaan Keberangkatan: <ul style="list-style-type: none">• HPK-B dan/atau SLO Pemeriksaan Kedatangan: <ul style="list-style-type: none">• Notifikasi ada/tidaknya dugaan pelanggaran (sebelum Sandar), Rekom

			Bongkar (sebelum bongkar) dan/atau HPK-D setelah selesai bongkar
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

3. Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

- Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2023 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat.
- Pemeriksaa importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan .
- Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan importasi hasil perikanan sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT, Sertifikat Pelepasan, Persetujuan Impor, Rencana Realisasi distribusi
2	Pemeriksaan	0,70	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021) • Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa • Realisasi distribusi
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

4. Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

- Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan;
- Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan
- Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah;
- Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT
2	Pemeriksaan	0,70	<ul style="list-style-type: none">• Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021)• Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

5. Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

- Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) lintas provinsi.
-

- Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.
- Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	SPT
2	Pemeriksaan	0,70	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I Perdirjen PSDKP No. 6/2021) • Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis sesuai dengan kegiatan usaha (KBLI) yang direncanakan diperiksa
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP
Jumlah Nilai		1	

6. Pengawasan Insidental

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal .
- Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan;
- Penilaian penyelesaian tahapan pemeriksaan pada pengawasan incidental dilakukan sebagaimana tabel berikut:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,15	<ul style="list-style-type: none"> Laporan aduan Laporan awal dugaan pelaku usaha illegal Sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
2	Pemeriksaan	0,70	Sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
3	Pelaporan	0,15	<ul style="list-style-type: none"> Laporan penyelesaian aduan kepada Pelapor Sesuai jenis pengawasan yang dilakukan
Jumlah Nilai		1	

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	UPT PSDKP
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA : Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- a. UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b. Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- c. UPT PSDKP/Dit.PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan);
- d. Dit.PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Formula:

Hasil Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut

$$\text{Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (xc)} = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

Xc = Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan sanksi administratif

$\sum b$ = Total kasus pelanggaran sanksi administratif yang direkomendasikan dikenakan sanksi

administratif

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan tidak ada kasus terkait sanksi administratif di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan sanksi administratif
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA : Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)

Formula:

Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Persentase Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100 \%$$

xa = Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan/atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3).

- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
 - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di *claim* sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
-

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP.Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP, yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO)
		Formula: Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut: $x_{ikm} = x_1$ x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO
4. SATUAN PENGUKURAN	:	indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Survei IKM Pengguna Layanan SLO di UPT PSDKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data

10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP;Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP, yaitu Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) dan <p>Formula: Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p>x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI</p>
4. SATUAN PENGUKURAN	:	indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Survei IKM Pengguna Layanan LVHPI di UPT PSDKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data

10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai WBK Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Komponen penilaian Wilayan Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Kriteria: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP

8. SUMBER DATA	:	Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang

dipenuhi
 b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;
- Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:
- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - **DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)**
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
- Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
 - b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
 - c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)

- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Formula:

- ASN Struktural :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Fungsional :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatfungsional} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Staf :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi E-SKP, Aplikasi SIMPEG Online
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">a. Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasib. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerjac. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:<ul style="list-style-type: none">• Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja• Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan• Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

CARA PENGUKURAN CAPAIAN

$$SKOR_{REKON} = \text{Nilai kepatuhan} + \text{Nilai kesesuaian} + \text{Nilai ketercapaian}$$

Nilai Kepatuhan:

$$Nilai_{kepatuhan} = 30\% \times \frac{\text{Dokumen yang ada}}{\text{Total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Dokumen yang dibutuhkan:

1. Perjanjian Kinerja
2. Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja
3. Rincian Target IKU
4. Rencana Aksi
5. LKJ/LCK
6. Data Dukung LKJ/LCK

Nilai Kesesuaian:

$$Nilai_{kesesuaian} = 30\% \times \frac{\text{Nilai kriteria dokumen yang disandingkan}}{\text{Total dokumen yang disandingkan}}$$

Kriteria dokumen yang disandingkan:

Target:

- A. PK – LKJ/LCK
- B. LKJ/LCK – Kinerja
- C. PK – Kinerja

Realisasi:

- D. LKJ/LCK TW I – Kinerja
- E. LKJ/LCK TW II – Kinerja
- F. LKJ/LCK TW III – Kinerja

Informasi data:

- G. Manual IKU – Kinerja
- H. Rincian Target – Kinerja

Nilai Ketercapaian:

$$Nilai_{ketercapaian} = 40\% \times \frac{Rata - rata\ NPSS\ triwulanan}{120} \times 100$$

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Lembar Kerja Evaluasi UPT
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
		ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• UPT Pengawasan SDKP ...
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
- Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
- Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:
 1. Tim Satker (6)
 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
 3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
 5. Upayakan Data Terkini (2)
 6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
 7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
 12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Formula:

$$N = \sum n$$

N = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Stasiun PSDKP Tarakan

n = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP, Komite dan Tim Budaya Kerja
8. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.• Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)• Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)• Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan
		Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Inovasi
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP			
8. SUMBER DATA	:	Inovasi UPT Stasiun PSDKP Tarakan			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
- Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:
 - Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
 - Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
 - Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

- **UKURAN :**
Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:
 - a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
 - b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
 - c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);
 - **CARA MENGUKUR :**
 - a) Menggunakan **Aplikasi Bitrix**
 - b) Pengukuran dilakukan **setiap triwulan dengan target** yang telah ditetapkan
 - c) Pengukuran dokumen:
 - a. **Perjanjian Kinerja** dilakukan setiap tahun
 - b. **Laporan Kinerja** dilakukan setiap triwulan
 - c. **Renaksi Kinerja**
 - d) Keikutsertaan akan direkap **setiap hari dalam satu triwulan**
 - e) Penghitungan Keaktifan dilakukan **setiap hari dalam satu triwulan** dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.
 - f) Untuk konten video diharapkan **bersifat edukasi atau ajakan**, yang **di upload minimal satu kali dalam triwulan.**
-

- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.**
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat.**
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.**

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi Bitrix bitrix24.com
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai)</p> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; ataud. Kurang, apabila nilai IKPA > 70 <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p style="text-align: center;">Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n): \text{Konversi bobot}$
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP		
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)		
9. STATUS DATA	:	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data	<input type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
- Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
-

- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian Output Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	UPT PSDKP
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
9. STATUS DATA	:	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data <input type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan